

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Keagenan

Teori keagenan di dasarkan pada konsep pemisahan antara pemilik dan manajer suatu perusahaan. Pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan merupakan salah satu faktor yang memicu timbulnya konflik kepentingan yang disebut dengan konflik keagenan (Hajawiyah, 2020).

Menurut (Sutedi, 2011) Teori keagenan merupakan hal dasar yang digunakan untuk memahami konsep *Good Corporate Governance*. Teori keagenan dipandang lebih luas karena teori ini dianggap lebih mencerminkan kenyataan yang ada. Teori agensi juga menjelaskan tentang timbulnya manajemen laba yang terjadi dalam suatu perusahaan. Dan dalam hal ini, seorang manajer mempunyai tanggung jawab lebih banyak terhadap perusahaan tersebut. Manajer harus dapat mengoptimalkan keuntungan perusahaan yang nantinya akan dilaporkan kepada pemilik dengan adanya imbalan yang besar. Dengan demikian, dalam perusahaan terdapat dua kepentingan yang berbeda yaitu kepentingan untuk mengoptimalkan keuntungan bagi perusahaan tersebut dan kepentingan bagaimana dengan memegang tanggung jawab yang besar, maka akan mendapatkan imbalan yang besar juga, yaitu kepentingan untuk pribadinya sendiri. Berkaitan dengan masalah

keagenan, *Good Corporate Governance* yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah mereka investasikan. *Good Corporate Governance* berkaitan dengan bagaimana para investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan mencuri atau menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana atau *capital* yang telah ditanamkan oleh investor, dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengontrol para manajer.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori keagenan karena menggunakan konservatisme akuntansi sebagai variabel dependen yang dapat mengakibatkan timbulnya asimetri informasi antara agen dan principal untuk kepentingan masing-masing. Pemegang saham akan berfokus pada bertambahnya hasil keuangan dan investasi dalam perusahaan, sedangkan manajer akan berfokus pada kompensasi keuangan yang diberikan oleh perusahaan atas prestasinya (Gerryansyah Putra Arrazzaq v, 2017). Hubungan teori keagenan dengan konservatisme akuntansi dapat mengurangi biaya agensi serta dapat meningkatkan informasi keuangan.

2. Konservatisme Akuntansi

Konservatisme merupakan prinsip kehati-hatian dalam pelaporan keuangan dimana perusahaan tidak terburu-buru dalam mengakui dan mengukur aset dan laba serta segera mengakui kerugian dan hutang yang kemungkinan yang terjadi. Penerapan prinsip ini mengakibatkan pilihan metoda akuntansi yang melaporkan laba atau aset yang lebih rendah serta melaporkan hutang lebih tinggi. Dalam konsep ini, beban diakui lebih cepat dan pendapatan diakui lebih lambat, sehingga *net income* terlihat rendah. Selanjutnya, konservatisme akan menyebabkan pelaporan keuangan yang pesimistik, hal tersebut akan mengurangi optimisme dari pengguna laporan (Andreas, 2017).

Konservatisme diterapkan karena akuntansi menggunakan dasar akrual dalam membentuk dan menyajikan suatu laporan keuangan perusahaan. Akrual menyebabkan pembentukan nilai akuntansi tidak hanya sekedar nilai riil dari transaksi keuangan, baik yang mengalir masuk dan keluar namun juga menyertakan suatu pencatatan mengenai nilai dari transaksi yang menimbulkan kemungkinan dari masuk dan keluarnya uang di masa mendatang, baik yang disebabkan transaksi di masa lalu dan masa sekarang. Dalam kaitan ketidakpastian di masa mendatang inilah kemudian akuntan menerapkan konservatisme yang mengantisipasi ketidakpastian aliran uang masuk dan uang keluar di masa mendatang karena penggunaan dasar akrual di dalam akuntansi (Savitri, 2016).

Penerapan prinsip ini mengakibatkan pilihan metode akuntansi ditujukan pada metode yang melaporkan laba atau aktiva yang lebih rendah serta melaporkan hutang lebih tinggi. Dengan demikian, pemberi pinjaman akan menerima perlindungan atas risiko menurun dari neraca yang menyajikan asset bersih dan laporan keuangan yang melaporkan berita buruk secara tepat waktu. Tujuan perusahaan melakukan konservatisme akuntansi untuk membatasi perilaku *opportunistic* manajer, meningkatkan nilai perusahaan dan mengurangi tuntutan hukum (Savitri, 2016).

Konservatisme merupakan karakteristik penting dari sistem akuntansi perusahaan yang dapat membantu dewan komisaris untuk mengurangi biaya keagenan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang pada gilirannya akan meningkatkan nilai perusahaan dan harga sahamnya (Wardhani et al., 2015). Konservatisme adalah prinsip yang akan mempengaruhi penilaian akuntansi. Namun, konservatisme juga merupakan konsep yang kontroversial. Beberapa penelitian melaporkan bahwa akuntansi konservatif tidak menguntungkan namun beberapa lainnya melaporkan sebaliknya.

PSAK sebagai standar pencatatan akuntansi di Indonesia menjadi pemicu diterapkannya prinsip konservatisme. Pengakuan prinsip konservatisme akuntansi dalam PSAK tercermin dari adanya berbagai pilihan metode pencatatan dalam kondisi yang sama (Savitri, 2016). Hal ini akan menghasilkan angka yang berbeda dalam laporan keuangan dan pada akhirnya akan menimbulkan laba yang cenderung

konservatif. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa secara tidak langsung konsep konservatisme akan mempengaruhi hasil laporan keuangan (Achyani, 2019).

Penilaian kegiatan operasional perusahaan dari konservatisme dengan *Earnings/accrual measure* (Yenti, Yona Efri, 2013). Rumus konservatisme sebagai berikut:

$$Cio = NIo - Cfo$$

Keterangan:

Cio = Tingkat konservatisme perusahaan I pada tahun waktu t

NIo = Laba bersih kegiatan operasional perusahaan

Cfo = Arus kas kegiatan operasi

3. *Good Corporate Governance (GCG)*

a. *Pengertian Good Corporate Governance*

Tata kelola perusahaan yang baik adalah suatu sistem yang mengatur hubungan antara pemangku kepentingan yang memiliki hak dan kewajiban tertentu terhadap perusahaan (Achyani, 2019). *Good Corporate Governance* diartikan sebagai suatu sistem pengelolaan perusahaan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum (Savitri, 2016). Penerapan prinsip *good corporate governance* dapat meningkatkan

kinerja perusahaan dan nilai ekonomi jangka panjang bagi investor dan pemangku kepentingan. Tujuan penerapan tata kelola perusahaan yaitu untuk mengoptimalkan nilai perusahaan agar memiliki daya saing yang meyakinkan, mendorong perusahaan untuk mengambil keputusan dengan nilai moral yang tinggi dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mendorong pengelolaan perusahaan agar lebih profesional, efektif, dan efisien.

Tata kelola perusahaan yang baik merupakan kunci keberhasilan perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang untuk menghadapi persaingan global, terutama bagi perusahaan yang telah berkembang dan *go public* (Achyani, 2019). Mekanisme tata kelola perusahaan yang baik terjadi ketika perusahaan memisahkan kepemilikan dan pengendalian yang mengacu pada seperangkat mekanisme untuk mempengaruhi keputusan manajer. Mekanisme muncul untuk membantu dalam upaya mengurangi biaya agensi.

b. Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

Menurut Sutedi (2011) ada beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam *good corporate governance*, yaitu sebagai berikut:

1) **Keterbukaan (*Transparency*)**

Penyediaan informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu kepada *stakeholders* harus dilakukan oleh perusahaan agar dapat dikatakan transparan. Pengungkapan yang memadai sangat diperlukan oleh investor dalam kemampuannya untuk membuat keputusan terhadap resiko dan keuntungan dari investasinya. Kurangnya informasi akan membatasi kemampuan investor untuk memperkirakan nilai dan resiko serta pertambahan dari perubahan modal. Intinya, perusahaan harus meningkatkan kualitas, kuantitas, dan frekuensi dari pelaporan keuangan. Pengurangan dari kegiatan curang seperti manipulasi laporan, pengakuan pajak yang salah dan penerapan dari prinsip-prinsip pelaporan yang cacat adalah masalah krusial untuk meyakinkan bahwa pengelolaan perusahaan dapat dipertahankan. Pelaksanaan menyeluruh dengan syarat-syarat pemeriksaan dan pelaporan yang sesuai hukum akan meningkatkan kejujuran dan pengungkapan.

2) **Akuntabilitas (*Accountability*)**

Akuntabilitas menekankan pada pentingnya penciptaan sistem pengawasan yang efektif berdasarkan pembagian kekuasaan antara komisaris, direksi, dan pemegang saham yang meliputi *monitoring*, evaluasi, dan pengendalian terhadap manajemen untuk meyakinkan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan

kepentingan pemegang saham dan pihak-pihak berkepentingan lainnya.

3) Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Responsibility adalah adanya tanggung jawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen serta pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham. Prinsip ini mewujudkan dengan kesadaran bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, menyadari akan adanya tanggung jawab sosial, menghindari penyalahgunaan wewenang kekuasaan, menjadi profesional dan menjunjung etika dan memelihara bisnis yang kuat.

4) Independen (*Independent*)

Untuk melancarkan asas *corporate governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Independen diperlukan untuk menghindari adanya potensi konflik kepentingan yang mungkin timbul oleh para pemegang saham mayoritas. Mekanisme ini menuntut adanya rentang kekuasaan antara komposisi komite dalam komisaris, dan pihak luar seperti auditor. Keputusan yang dibuat dan proses yang terjadi harus objektif tidak dipengaruhi oleh kekuatan pihak-pihak tertentu.

5) Kejujuran (*Fairness*)

Prinsip kelima dari pengelolaan perusahaan penekanan pada kejujuran, terutama untuk pemegang saham minoritas. Investor harus memiliki hak-hak yang jelas tentang kepemilikan dan sistem dari aturan dan hukum yang dijalankan untuk melindungi hak-haknya.

c. Mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG)

Mekanisme *corporate governance* mengacu pada sekumpulan mekanisme yang mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh manajer ketika terjadi pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian. Mekanisme *good corporate governance* terdiri dari 6 indikator yaitu ukuran dewan komisaris, komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan komite audit. Dalam penelitian ini, penulis memproksikan mekanisme GCG dengan 3 (tiga) variabel antara lain kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit.

1) Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham suatu perusahaan oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lainnya (Kusmayadi, 2015). Institusi merupakan lembaga yang memiliki kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukan termasuk investasi saham. Institusi sebagai pemilik saham

dianggap lebih mampu dalam mendeteksi kesalahan yang terjadi. Hal ini dikarenakan investor institusi lebih berpengalaman dibandingkan dengan investor individual.

Kepemilikan institusional memiliki peranan yang cukup penting terutama untuk meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajemen dan pemegang saham. Selain itu, kepemilikan institusional dapat bertindak sebagai pihak yang memonitor manajemen, karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen, sehingga manajemen lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Aktivitas *monitoring* yang dilakukan institusi mampu mensubstitusikan biaya keagenan lain, sehingga biaya keagenan menurun dan nilai perusahaan meningkat (Rachman, 2018). Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional, sehingga dapat menghalangi perilaku *opportunistic* manajer.

$$KI = \frac{\text{Jumlah Saham yang Dimiliki Institusi}}{\text{Jumlah Saham yang Beredar}} \times 100\%$$

2) Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen adalah anggota komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota komisaris lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya dalam

bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Dewan komisaris memegang peranan penting dalam perusahaan dan merupakan inti dari *corporate governance* yang memiliki tugas untuk menjamin strategi perusahaan, mengawasi manajer dalam mengelola perusahaan serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Komisaris independen berfungsi sebagai penyeimbang dalam pengambilan keputusan oleh dewan komisaris (Effendi, 2016).

Keberadaan komisaris independen dapat memberikan jaminan kualitas yang lebih baik dalam memantau pemegang saham. Hal ini karena komisaris independen menuntut adanya laporan keuangan yang akurat dan dapat diverifikasi. Komisaris independen berupaya untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap kegiatan operasional perusahaan. Pengamatan ini dilakukan agar informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan dapat disajikan secara akurat dan transparan. Dengan menambah proporsi dewan komisaris independen, maka perusahaan dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan meningkatkan pengawasan terhadap direksi dan manajer yang akan berpengaruh terhadap tingkat konservatisme akuntansi perusahaan (S Fitriani, 2014).

$$\text{DKI} = \frac{\text{Jumlah anggota komisaris independen}}{\text{Jumlah total anggota dewan komisaris}} \times 100\%$$

3) Komite Audit

Komite audit merupakan sekelompok orang yang dipilih dari dewan komisaris perusahaan yang bertanggung jawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen (Sutedi, 2011). Komite audit bertugas membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan (Effendi, 2016).

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 55/POJK.04/2015 perihal keanggotaan komite audit, disebutkan bahwa:

- 1) Jumlah anggota komite audit sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, termasuk ketua komite audit.
- 2) Anggota komite audit yang berasal dari komisaris, hanya sebanyak 1 (satu) orang. Anggota komite audit yang berasal dari komisaris tersebut harus merupakan komisaris independen Perusahaan Tercatat yang sekaligus menjadi ketua komite audit.
- 3) Anggota lainnya dari komite audit adalah berasal dari pihak eksternal yang independen. Pihak eksternal adalah pihak luar Perusahaan Tercatat yang bukan merupakan komisaris, direksi dan karyawan Perusahaan Tercatat, sedangkan independen adalah pihak diluar Perusahaan Tercatat yang tidak memiliki

hubungan usaha dan hubungan afiliasi dengan Perusahaan Tercatat, komisaris, direksi dan Pemegang Saham Perusahaan Tercatat dan mampu memberikan pendapat professional secara bebas sesuai dengan etika profesionalnya, tidak memiliki kepentingan terhadap siapapun.

$\text{Komite Audit} = \sum \text{Anggota Komite Audit Perusahaan}$

4. *Audit Brand Name*

Kualitas Kantor Akuntan Publik merupakan sebuah citra yang terbentuk berdasarkan penilaian yang diberikan oleh para *klien*. Kualitas KAP menunjukkan citra kualitas auditor atas kerja yang baik dan menunjukkan hasil yang terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. *Audit Brand Name* seringkali dikaitkan dengan nama besar suatu kantor akuntan publik (KAP). Menurut (Rahiim & Wulandari, 2016), kualitas kantor akuntan publik dapat mengacu pada nama KAP atau *audit brand name* yang tercermin dari kerjasama dengan Kantor Akuntan Publik Asing (KAPA) dan Organisasi Audit Asing (OAA). Kualitas audit dikenal karena jaminan independennya atas keteguhan laporan yang ada pada dirinya, mempromosikan perlindungan investor dan meningkatkan kepercayaan klien (Bala dan Amran, 2018). Biasanya perusahaan atau klien akan memakai layanan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam mengaudit laporan keuangannya. Calon auditee biasanya memakai layanan KAP yang mempunyai reputasi guna meningkatkan kualitas laporan

keuangan. Dalam meningkatkan nilai plus KAP, beberapa KAP memutuskan beraliansi dengan KAP internasional ((Febriani, Emi, Maslichah, 2020). KAP lokal beraliansi bersama Kantor Akuntan Publik Asing (KAPA) juga Organisasi Audit Asing (OAA) bercermin pada KAP name atau *audit brand name*. KAP juga OAA diasumsikan mempunyai keahlian, standar mutu dan lebih berpengalaman dari pada KAP yang tidak beraliansi dengan asing (Sari Novika, 2016). Dengan kontrak KAP asing dinilai bisa memberi hasil audit yang jauh berkualitas, dari pada KAP yang tidak beraliansi dirasa mempunyai pengetahuan luas dan memahami dalam mengaudit perusahaan. Menurut (Alfian, 2013) KAP lebih menuju pada kemampuan auditor bersikap independen serta melaksanakan audit secara professional, karena KAP secara ekonomi lebih tidak tergantung pada klien. KAP yang beraliansi dengan KAPA juga OAA berusaha mengoptimalkan kualitas audit sampai bisa mengetahui ada tidaknya manajemen keuntungan yang mempunyai pengalaman mumpuni juga menangkalkan aktivitas manajemen keuntungan yang oportunistik oleh *klien* (Febriani, Emi, Maslichah, 2020).

Menurut (Mulya, 2014) KAP bereputasi menjelaskan adanya sikap independensi auditor dalam melaksanakan tugas audit, reputasi memiliki kaitan dengan ukuran KAP, KAP besar cenderung memiliki reputasi yang lebih tinggi. *Audit Brand Name* diukur menggunakan variabel *dummy*, angka 0 diberikan bagi yang KAP non Big Four dan nilai 1 bila perusahaan *klien* diaudit KAP Big Four.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1.	Emi Febriani Maslichah Junaidi (2020)	Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance, Audit Brand Name Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Konservatisme Akuntansi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018	Kepemilikan Manajerial, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Audit Brand Name dan Ukuran Perusahaan secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan pada Konservatisme Akuntansi. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial menunjukkan <i>Audit Brand Name</i> dan Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh positif yang signifikan pada Konservatisme Akuntansi. Sedangkan Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional dan Proporsi Dewan Komisaris Independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Konservatisme Akuntansi
2.	Ain Hajawiyah, Agus Wahyudin, Kiswanto, Sakinah and Indra Pahala (2020)	The Effect Of Good Corporate Governance Mechanisms on Accounting Conservatism With Leverage As a Moderating Variable	Kepemilikan institusional dan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Sedangkan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap konservatisme akuntansi.
3.	Rasyadhiar Rachman, Tumpal Manik, Inge Lengga Sari Munthe (2018)	Pengaruh Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap	Komisaris independen dan kepemilikan institusional secara parsial tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Kepemilikan manajerial dan ukuran dewan komisaris secara parsial berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan ukuran dewan komisaris secara simultan

		Konservatisme Akuntansi Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018	berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi.
4.	Einde Evana, Edwin Mirfazli, Adriana Tiron Tudor dkk (2015)	The Effect Of Independent Commissioners, Managerial Ownership, And Audit Committee On Accounting Conservatism	Variabel kepemilikan manajerial yang berpengaruh negatif signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Sedangkan variabel komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi.
5.	Anissa Amalia Mulya(2014)	Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance (GCG), <i>Audit Brand Name</i> Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Konservatisme Akuntansi	Secara parsial Variabel Kepemilikan Manajerial, Proporsi Dewan Komisaris dan Kepemilikan Institusional tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Konservatisme Akuntansi. Sedangkan Variabel <i>audit brand name</i> dan Ukuran Perusahaan mempunyai pengaruh yang signifikan dengan arah positif terhadap Konservatisme Akuntansi. Secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Kepemilikan Manajerial, Proporsi Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional, <i>Audit Brand Name</i> dan Ukuran Perusahaan terhadap Konservatisme Akuntansi.
6.	(Veres dkk, 2013)	Hubungan Mekanisme Good Corporate Governance dan Kualitas Kantor Akuntan Publik Terhadap Konservatisme	Pada penelitian ini menunjukkan setiap variabel independen secara simultan tidak memiliki hubungan terhadap variabel dependennya. Hasil penelitian secara parsial diperoleh bahwa hanya ukuran dewan komisaris yang berpengaruh positif terhadap konservatisme

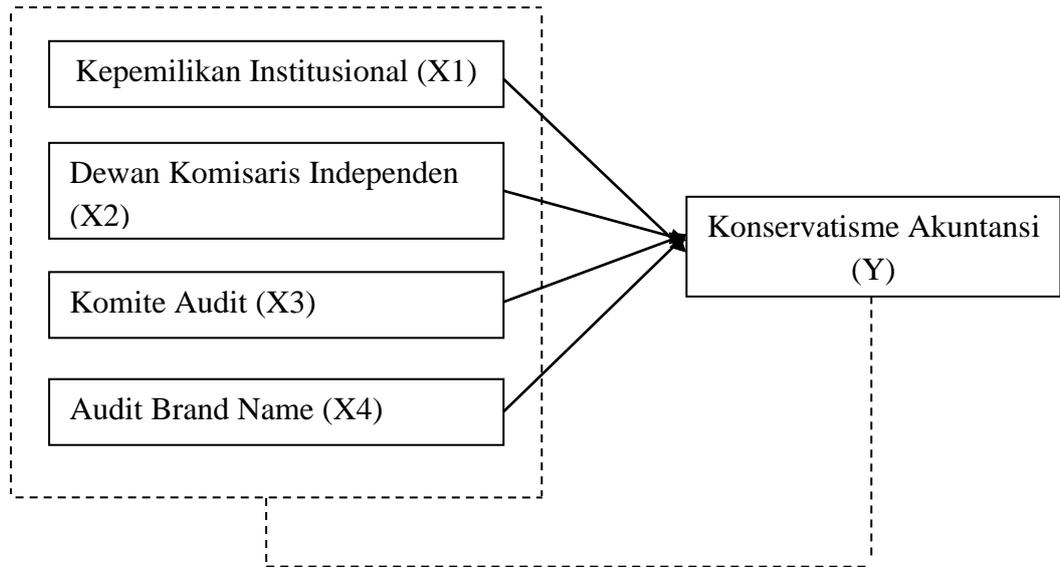
		Akuntansi di Industri Perbankan Indonesia Periode 2009-2011	akutansi. Sedangkan untuk variabel independen lainnya (kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris, kepemilikan institusional, jumlah patner atas izin akuntan, <i>audit brand name</i> , serta <i>firm size</i>) menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen tersebut.
--	--	---	---

Sumber : Olahan penulis 2022

C. Kerangka Teori

Berdasarkan tinjauan pustaka yang sudah penulis uraikan, maka kerangka pemikiran dalam penelitian adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Keterangan:

————— = Parsial
 - - - - - = Simultan

D. Hipotesis

Menurut (Sugiyono, 2014), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Hipotesis dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori.

1. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Konservatisme Akuntansi

Penelitian yang dilakukan oleh (Gerryansyah Putra Arrazzaq v, 2017) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Hajawiyah, 2020) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Hal ini sejalan dengan (Amidu & Abor, 2016) dan (Radyasinta Surya Pratanda dan Kusmuriyanto, 2014) menemukan hasil yang signifikan antara komisaris independen dan konservatisme akuntansi. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H₁: Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap Konservatisme Akuntansi

2. Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Konservatisme Akuntansi

Penelitian yang dilakukan (Alvino, 2020) oleh menunjukkan bahwa independensi komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat konservatisme akuntansi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Noviyanti & Agustina, 2021) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi. Hal ini membuktikan bahwa jika jumlah komisaris independen melimpah maka penerapan konservatisme akuntansi akan

meningkat pada suatu entitas. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mirfazli & Tudor, 2015) menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H₂: Dewan Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap Konservatisme Akuntansi

3. Pengaruh Komite Audit Terhadap Konservatisme Akuntansi

Penelitian yang dilakukan oleh (Brilianti, 2013) menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Sedangkan penelitian Wardhani (2008) memberikan bukti bahwa keberadaan komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat konservatisme dengan menggunakan ukuran akrual. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Sonia Fitriani, 2014) yang menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Kehadiran komite audit akan memastikan bahwa perusahaan menerapkan prinsip akuntansi yang akan menghasilkan informasi keuangan perusahaan yang akurat dan berkualitas melalui penggunaan prinsip konservatisme yang tinggi dalam proses pelaporan keuangan perusahaan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H₃: Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap Konservatisme Akuntansi

4. Pengaruh *Audit Brand Name* Terhadap Konservatisme Akuntansi

Penelitian yang dilakukan oleh (Mulya, 2014) menunjukkan bahwa *audit brand name* mempunyai pengaruh yang signifikan dengan arah positif terhadap konservatisme akuntansi. Sedangkan dari hasil penelitian yang dilakukan (Veres dkk, 2013) *audit brand name* tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi perusahaan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H₄: *Audit Brand Name* berpengaruh signifikan terhadap Konservatisme Akuntansi

5. Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan *Audit Brand Name* terhadap Konservatisme Akuntansi

Mekanisme *corporate governance* meliputi komite audit, dewan komisaris independen, kepemilikan institusional yang dilaksanakan secara menyeluruh dianggap akan mengurangi tindakan oportunistik manajer dan manajer akan bersikap hati-hati dalam menyusun laporan keuangannya. Kualitas Kantor Akuntan Publik yang baik tentunya akan memiliki reputasi atau *audit brand name* yang baik pula sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Febriani, Emi, Maslichah, 2020) menunjukkan bahwa Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Audit Brand Name dan

Ukuran Perusahaan secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan pada Konservatisme Akuntansi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Veres dkk, 2013) menunjukkan bahwa setiap variabel independen (kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris, kepemilikan institusional, jumlah patner atas izin akuntan, audit brand name, serta firm size) secara simultan tidak memiliki hubungan terhadap variabel dependennya (konservatisme akuntansi). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H₅: Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan *Audit Brand Name* berpengaruh signifikan terhadap Konservatisme Akuntansi